

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

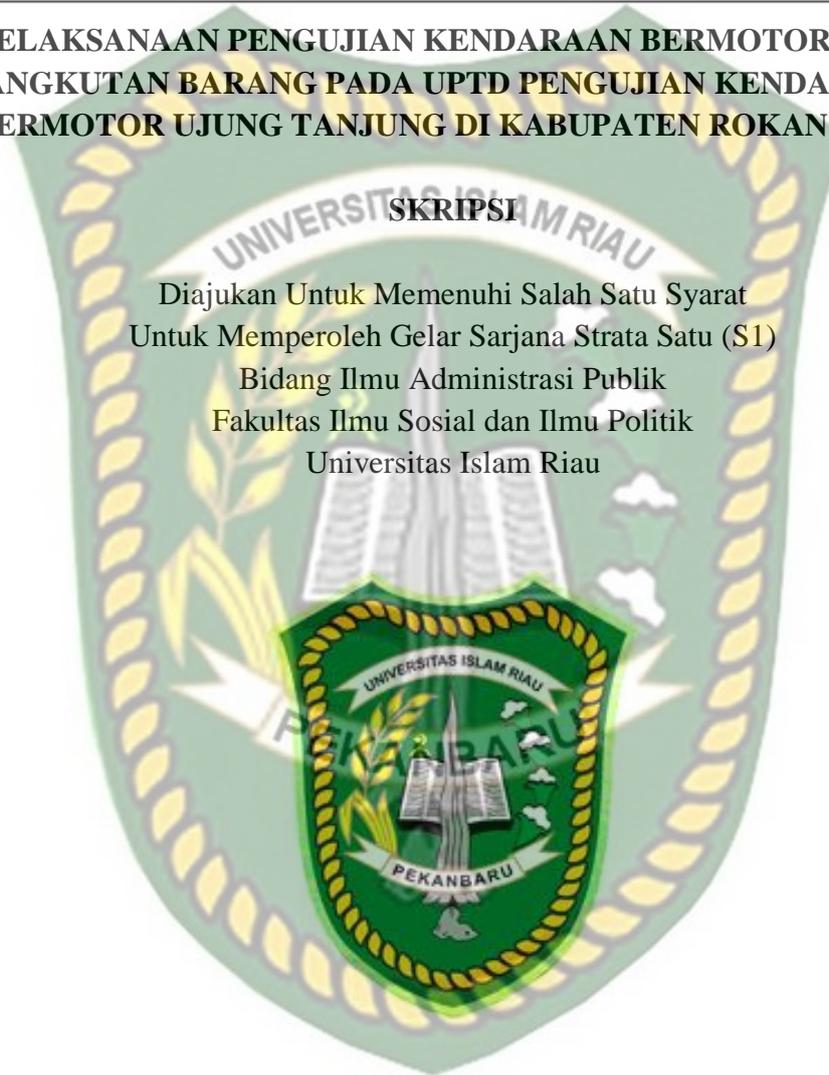
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS
ANGKUTAN BARANG PADA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR UJUNG TANJUNG DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Bidang Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



YUDHA YUDANTO

167110984

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Yudha Yudianto
NPM : 167110984
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir.

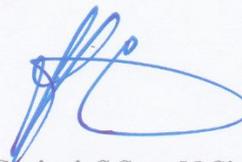
Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Usulan Penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konfrehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pekanbaru, 19 juli 2021
Pembimbing



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : YUDHA YUDANTO
NPM : 167110984
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di
Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah skripsi secara keseluruhan telah dinilai, relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

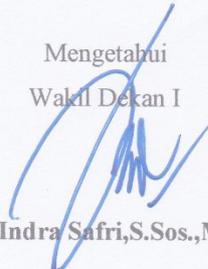

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota


Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : YUDHA YUDANTO
NPM : 167110984
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di
Kabupaten Rokan Hilir.

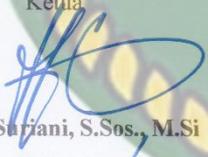
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai bukti karya ilmiah.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022

a.n. Tim Penguji

Setretaris

Ketua


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu
Administrasi Publik


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudha Yudanto
NPM : 167110984
Jurusan : Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juli 2022
Pelaku Pernyataan,



Yudha Yudanto

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena Ridhonya penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTA BARANG PADA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJUNG TANJUNG DI KABUPATEN ROKAN HILIR”**

Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kita menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya di akhirat nanti aamiin yarobbal alamin.

Usulan penelitian ini merupakan sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada program studi Administrasi Publik jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Islam Riau, yang mana penulis sendiri juga menimba ilmu di perguruan tinggi swasta tersebut.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini baik secara langsung, materi, tenaga, pengarahan, nasehat dan pemikiran yang dikemukakan sehingga penulis bisa melanjutkan ketahap skripsi.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan Fasilitas Pendidikan dan pengajaran di Kota Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si selaku ketua program studi Administrasi Publik juga sekaligus sebagai Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos.,M.Si selaku sekretaris program studi Administrasi Publik.

5. Bapak dan ibu Dosen yang telah membantu mengurus yang berkaitan dengan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan ibu Tata Usaha yang telah membantu mengurus yang berkaitan dengan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
7. Terkhusus kepada Ayahanda penulis Bapak Mundaryanto, dan Ibunda Iryati yang telah mendukung penulis, mendoakan penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan proses menimba ilmu di Universitas Islam Riau. Semoga kesehatan keimanan dan rezeki selalu mengalir kepada kedua orang tua penulis aamiin.
8. Teman Lokal A Administrasi Publik dan Teman Administrasi Publik angkatan 2016 yang bersama sama mendukung penulis baik memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

Dalam proses penulisan Usulan Penelitian ini Penulis sadari bahwa masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi tercapainya kesempurnaan Usulan Penelitian.

Akhir kata penulis mengharap semoga Usulan Penelitian ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa menjadi bahan rujukan bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama/

Penulis akhiri Wassalamualaikum wr.wb

Pekanbaru, 19 Juli 2022
Peneliti,

Yudha Yudanto

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Administrasi	17
2. Konsep Organisasi.....	21
3. Konsep Manajemen.....	22
4. Konsep Sumber Daya Manusia	25
5. Konsep Pelaksanaan	27
6. Konsep Implementasi.....	32
B. Kerangka Pikir	32
C. Hipotesis.....	34
D. Konsep Operasional Variabel	34
E. Operasional Variabel.....	35
F. Teknik Pengukuran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	38

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	39
D. Teknik Penarikan Sampel.....	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	43
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Rokan Hilir.....	44
1. Geografis	44
2. Pemerintahan.....	45
3. Penduduk.....	46
B. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir	47
1. Sejarah Umum UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir	47
2. Visi, Misi.....	48
3. Struktur Organisasi.....	48
4. Sumber Daya Manusia Dan Kompetensi Pegawai.....	49
5. Tugas dan Fungsi	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	56
1. Jenis Kelamin	56
2. Usia	57
3. Pendidikan.....	59
B. Hasil Penelitian Tentang pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir	60
1. Komunikasi	61
2. Sumber Daya	65

3. Disposisi	68
4. Struktur Birokrasi.....	72
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir	79

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

Lampiran	84
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tarif Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.....	11
Tabel I.2 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Yang Melaksanakan Uji Berkala Pertama dan Uji Berkala Ulangan Pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.....	12
Tabel II.1 Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir.....	35
Tabel III.1 Populasi dan Sampel tentang Pelaksanaan Pengujian pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir	39
Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir	43
Tabel IV.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 2020	44
Tabel IV.2 Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir	45
Tabel IV.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021	46
Tabel IV.4 Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Penguji	49
Tabel V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang	56
Tabel V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Masyarakat yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang	57
Tabel V.3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Usia Pegawai Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir	57

Tabel V.4Distribusi Responden Menurut Tingkat Usia Masyarakat Yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang	58
Tabel V.5Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir	59
Tabel V.6Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir.....	60
Tabel V.7Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir.....	61
Tabel V.8Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir	62
Tabel V.9Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir.....	65
Tabel V.10Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator Disposisi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	66
Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir	
Tabel V.11Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Disposisi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	

Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung Tanjung Di
Kabupaten Rokan Hilir..... 69

Tabel V.12 Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator
Struktur Birokrasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan
Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung
Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir 70

Tabel V.13 Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator
Struktur Birokrasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan
Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Ujung
Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir 72

Tabel V.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai terhadap Pelaksanaan
Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD
Pengujian Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir..... 73

Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat terhadap
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang
Pada UPTD Pengujian Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir
..... 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir.....	33
Gambar IV.1 Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Sementara itu, dalam konteks mobilitas manusia, transportasi dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan dan sarana untuk mengisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu masyarakat. Oleh karena itu, transportasi merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong kemajuan sosial.

Jalan raya di Kabupaten Rokan Hilir sangat banyak dilalui oleh kendaraan bermotor seperti angkutan umum lintas propinsi, travel umum / pribadi, angkutan barang serta sepeda motor roda dua. Mengingat banyaknya jenis kendaraan yang melintas di Kabupaten Rokan Hilir pada dinas yang terkait selalu mengawasi kendaraan tersebut terutama sekali pada angkutan barang, selain dari kondisi kendaran yang layak untuk dikendarai terlebih lagi dengan jumlah tonase angkutan barang juga tidak boleh melebihi dari batas ketentuan yang berlaku karena akan sangat membahayakan keselamatan para kendararaan lain yang melintas pada area tersebut.

Fakta bahwa transportasi orang dan barang tidak terlayani telah menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam permintaan untuk layanan yang lebih baik. Transportasi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan kualitas udara luar ruangan, penyebaran penyakit pernapasan (terutama di daerah dengan kepadatan lalu lintas yang luar biasa

tinggi), kecelakaan lalu lintas, menipisnya sumber energi tak terbarukan, dan emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar non-energi, berkontribusi pada pelepasan gas rumah kaca yang masif akibat pembakaran bahan bakar tak terbarukan.

Sektor transportasi merupakan penyebab utama masalah lingkungan saat ini. Peningkatan karbon monoksida, kebisingan, polusi udara dan gangguan fisik pada lingkungan dan budaya, merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh transportasi.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah preventif. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilakukan pengujian. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum.

Kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan laik jalan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan namun pada saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

pasal 4, jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Jenis-jenis kendaraan tersebut wajib untuk melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan sekali seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 5 Ayat (5). Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Dalam upaya untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas serta pengendalian masalah lingkungan, langkah yang dilakukan adalah melalui Pengujian Kendaraan bermotor

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 pasal 2, tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan, serta memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruhan wilayah. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir menempatkan keselamatan transportasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan, termasuk bidang transportasi merupakan tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi Dinas Perhubungan dalam menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang transportasi serta kemudahan mengakses berbagai informasi melalui media yang ada.

Sejalan dengan itu, pada kasus ini penulis mengambil tempat penelitian yang akan penulis teliti yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan hilir. Profil singkat UPT pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu kantor yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang mana kantor tersebut di bawah naungan atau cabang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yang digunakan sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir sebagai intitusi yang melaksanakan uji kelayakan kendaraan atau pemastian laik jalan kepada pemilik kendaraan bermotor harus memberikan hasil yang berkualitas sehingga dapat mencapai kepuasan masyarakat. Apalagi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan pengguna kendaraan bermotor tersebut atau pengguna jalan lainnya.

a. Tahapan dan elemen dalam uji kir mobil

1. Tahapan pra uji

Adalah tahapan dimana petugas melakukan pemeriksaan terhadap validasi data kendaraan dan nomor mesin kendaraan. Pada tahapan selanjutnya namun masih dalam tahapan pra uji, petugas akan meakukan uji visual. Petugas memeriksa setiap komponen kendaraan, apakah masih lengkap atau tidak.

2. Smoke tester

Elemen ini berfungsi untuk mengecek ketebalan asap kendaraan pada mobil bertenaga diesel. Sementara untuk mobil berbahan bakar bensin akan dilihat kadar karbondioksida pada kendaraan tersebut.

3. Sound tester

Pada tahap ini, petugas melakukan pengukuran kebisingan suara getaran dan suara klakson.

4. Head light tester

Adalah pengukuran intensitas cahaya lampu utama pada kendaraan.

5. Window tint tester

Untuk mengetahui ketebalan kaca film yang digunakan kendaraan.

6. Side slip tester

Merupakan pengecakan kondisi pengendalian sistem roda kemudi dan juga kelurusan sumbu kendaraan, kondisi kingpin, boljoin dan bantalannya.

7. Axle road

Merupakan tahapan uji kendaraan untuk menimbang beban kendaraan pada saat tanpa muatan.

8. Brake tester

Merupakan pengujian efisiensi dari rem kendaraan.

9. Speedometer tester

Tahapan terakhir adalah untuk mengukur ketimpangan antara speedometer pada kendaraan.

Dalam prosedur pengurusan KEUR/KIR di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi kendaraan wajib uji berkala yang aktif terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: mobil bus, mobil barang, kereta gandengan/tempelan, mobil penumpang umum beroda tiga, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus.

Adapun Tugas Mekanisme Operasional Prosedur Pengujian pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

1. Uji Berkala Pertama

1. Pemilik/pemegang kendaraan bermotor mengajukan permohonan Uji Berkala kepada koordinator bagian penerima pendaftaran dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat permohonan pelaksanaan uji kendaraan
 - b. Fotocopy sertifikat registrasi uji tipe
 - c. Spesifikasi teknis kendaraan
 - d. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Uji Mutu, khusus kendaraan yang memiliki Sertifikat RancangBangunan
 - e. Surat Penentuan jenis Kendaraan (SPJK) dan/atau Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK)
 - f. Fotocopy STNK yang berlaku
 - g. Surat Keterangan Uji Tera dari Kantor Metrologi, Khusus Mobil Tangki

- h. Fotocopy KTP pemilik Kendaraan dan atau surat Kuasa dari pemilik kendaraan bagi yang bukan pemilik kendaraan wajib uji
 - i. Fotocopy SIUP dan SITU bagi kendaraan milik perusahaan/badan usaha
 - j. Membawa kendaraan yang akan diuji.
2. Koordinator bagian penerima pendaftaran menerima berkas permohonan pemilik kendaraan, selanjutnya melakukan kegiatan:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan administrasi berkas permohonan
 - b. Menyerahkan berkas permohonan yang dianggap lengkap kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mendapatkan disposisi persetujuan pemberian Nomor uji Kendaraan Baru.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerima berkas Surat Permohonan dari Koordinator bagian penerima pendaftaran, melakukan kegiatan
 - a. Verifikasi berkas surat permohonan terhadap ketentuan yang berlaku
 - b. Memberi disposisi persetujuan untuk pemberian Nomor Uji Baru dan didata dalam data base Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c. Menyerahkan kembali berkas surat permohonan yang telah mendapat disposisi persetujuan dan penetapan Nomor Uji Kendaraan Baru kepada Koordinator bagian penerima pendaftaran
4. Koordinator penerima pendaftaran menerima berkas surat permohonan yang telah mendapat disposisi dari kepala Sub Bagian Tata Usaha, melakukan kegiatan:
 - a. Meregistrasi data kendaraan dan pemberian Nomor Uji ke dalam Buku Kontrol Penomoran Uji

- b. Menyerahkan Berkas surat permohonan yang telah diberi Nomor Uji kepada Koordinator bagian Data Base Management System (DBMS)
5. Koordinator bagian Data Base Management System (DBMS) menerima berkas surat permohonan dari kordinator penerima pendaftaran, melakukan kegiatan:
 - a. Meng-input data identitas kendaraan kedalam Data Base
 - b. Menyerahkan berkas surat data identitas kendaraan yang telah diinput dan mengarahkan kepada pemohon untuk membayar Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor pada Loket Pembayaran Biaya Pengujian (Koordinator bagian penerima uang Pengujian Kendaraan Bermotor)
6. Koordinator bagian penerima uang Pengujian Kendaraan Bermotor menerima berkas surat dan uang biaya pengujian kendaraan bermotor dari pemilik kendaraan, selanjutnya melakukan kegiatan:
 - a. Mencetak Kwitansi Tanda Pembayaran
 - b. Menyerahkan kwitansi tanda pembayaran dan berkas surat kepada pemohon
 - c. Mengarahkan kepada pemohon kembali ke koodinator bagian penerima pendaftaran
 - d. Meregistrasi dan mendata setiap penerima uang serta mengelola arsip kwitansi pertanggal
7. Koordinator bagian penerima pendaftaran menerima berkas surat pemohon dan kwitansi tanda pembayaran, melakukan kegiatan:

- 
- a. Penetapan tanggal Pengujian kendaraan dan mencetak fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan untuk ditanda tangani oleh pemilik kendaraan sebagai pemohon
 - b. Menetapkan nomor urut pemeriksaan teknis kendaraan
 - c. Mengarahkan pemohon dan kendaraannya ke koordinator bagian kendaraan untuk pemeriksaan/pengujian kondisi teknis kendaraanya Pengujian
 - d. Menyerahkan semua berkas surat dan kwitansi tanda pembayaran kepada Sub Bagian Tata Usaha
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerima semua berkas surat permohonan dari pemilik kendaraan, kemudian melakukan kegiatan:
- a. Membubuhi paraf pada formulir Daftar Pemeriksaan sebagai pernyataan bahwa surat permohonan telah melalui proses administrasi sesuai prosedur
 - b. Menyerahkan semua berkas surat permohonan yang telah di paraf dan disposisi Kepala UPT
9. Kepala UPT menerima semua berkas surat permohonan yang telah di paraf dan disposisi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menindaklanjuti dengan kegiatan:
- a. Membuat disposisi pada formulir Daftar Pemeriksaan Kendaraan kepada kordinator Pengujian Kendaraan Bermotor untuk segera melaksanakan pengujian kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b. Menyerahkan semua berkas surat permohonan kepada Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pelaksanaan pemeriksaan/pengujian teknis kendaraan
10. Koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan pengisian formulir daftar pemeriksaan dengan melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. Pemeriksaan pra uji mekanis
 - b. Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan
 - c. Penentuan dimensi kendaraan
 - d. Penetapan berat sumbu dan berat total kendaraan
 - e. Penetapan daya angkut orang dan barang
 - f. Penetapan muatan sumbu terberat
 - g. Menetapkan jumlah berat yang diizinkan (JBI) kendaraan yang diuji
 - h. Menetapkan kelas jalan yang di lalui
 - i. Menetapkan masa berlaku uji
11. Jika dinyatakan Tidak Lulus Uji, koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor Meregistrasi dan menyampaikan kepada pemohon, antara lain:
 - a. Alasan-alasan teknis penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Memerintahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan alasan penolakan
 - c. Menetapkan tanggal Uji Ulangan berikutnya Jika dinyatakan Lulus Uji, koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor menyerahkan formulir Daftar Pemeriksaan Kendaraan yang telah diisi data teknis

kendaraan kepada Koordinator bagian pengecatan/pembuatan Plat Samping dan Pengetokan Plat Uji.

12. Koordinator bagian pengecatan/pembuatan plat samping dan pengetokan plat uji menerima formulir Daftar Pemeriksaan dari Koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor, melakukan kegiatan
 - a. Pengetokan Nomor Uji pada chassis kendaraan
 - b. Pembuatan Plat Samping
 - c. Pengetokan dan permasalahan pelat uji
 - d. Membubuhi paraf tanda kegiatan telah dilaksanakan pada formulir daftar pemeriksaan
 - e. Menyerahkan formulir Daftar Pemeriksaan kepada koordinator bagian Data Base Management System (DBMS)
13. Koordinator bagian Data Base Management System (DBMS) menerima fomulir daftar Pemeriksa kendaraan yang telah diisi data teknik dan tanda paraf dari Koordinator bagian pengecatan/pembuatan pelat samping dan pengetokan pelat uji, selanjutnya melakukan kegiatan :
 - a. Pemasukan (input) data teknis yang tertera pada fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan yang telah diisi oleh Koordinator Penguji Kendaraan Bermotor
 - b. Mencetak (print-out) data pada Buku Uji
 - c. Mencetak (print-out) data pada Kartu Induk Pemeriksaan kedaraan

d. Menyerahkan fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan, Buku Uji yang telah tercetak data, KIP yang telah tercetak data kepada Koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor

14. Koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor menerima berkas surat dari Koordinator bagian Data Base Management System (DBMS), melakukan kegiatan:

- a. Penandatanganan Buku Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan kendaraan
- b. Menyerahkan Buku Uji kepada pemilik/pemegang kendaraan sebagai proses pengujian telah selesai dilaksanakan dan kendaraan siap operasi
- c. Menyerahkan semua berkas surat kepada Koordinator bagian penerima pelayanan/pendaftaran serta Kartu Induk pemeriksaan kendaraan kepada Koordinator bagian pengelolaan KIP untuk di inventarisasi dan pendataan.

II. Pelayanan Uji Berkala Ulangan

1. Pemilik/pemegang kendaraan wajib uji mengajukan permohonan pelaksanaan uji berkala ulangan kepada Koordinator bagian penerima pelayanan/pendaftaran (Loket Pendaftaran), dengan melampirkan persyaratan:

- a. Membawa tanda bukti lulus uji yang lama (Buku Uji);
- b. Melampirkan fotocopi STNK yang berlaku;
- c. Melampirkan Izin Trayek/ Kartu Pengawas (KP), khusus bagi mobil bus umum dan mobil penumpang umum;

- d. Melampirkan fotocopi tanda jati pemilik kendaraan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik kendaraan bagi yang bukan pemilik kendaraan wajib uji;
 - e. Membawa kendaraan yang akan di uji dalam kondisi bersih;
 - f. Membayar biaya Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan PERDA yang berlaku pada Loket pembayaran Biaya Pengujian.
2. Koordinator bagian penerima pelayanan/pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi berkas permohonan pemilik/pemegang kendaraan, jika berkas permohonan dianggap lengkap dilanjutkan dengan kegiatan :
- a. Menginput tanggal permohonan uji dan mencetak (print-out) data kendaraan pada fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan untuk diserahkan kepada pemilik/pemegang kendaraan
 - b. Menetapkan nomor urut pemeriksaan kondisi teknis kendaraan
 - c. Menyerahkan fomulir Daftar Pemeriksaan Kendraan dan mengarahkan kepada pemilik/pemegang kendaraan untuk memasuki Ruang Pemeriksaan Pengujian Teknis Kendaraan
 - d. Menyerahkan berkas surat dan buku uji permohonan kepada Koordinator bagian pengelolaan Kartu Induk Pemeriksaan (KIP) untuk di persiapkan
3. Koordinator bagian pengelolaan KIP kendaraan, melakukan kegiatan
- a. Mempersiapkan KIP kendaraan serta melampirkan berkas surat dan buku uji kendaraan yang akan di uji,
 - b. Menyerahkan semua berkas surat tersebut kepada Koordinator Penguji Kendaraan bermotor

4. Koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor menerima fomulir Daftar Pemeriksaan dari pemilik/pemegang kendaraan dan melaksanakan pengisian fomulir Daftar Pemeriksan kendaraan dengan melakukan kegiatan, antara lain:

- a. Memeriksa kebersihan kendaraan yang akan di uji dan pemeriksaan pra uji mekanis; Pemeriksaan/pengujian kondisi tenis kendaraan
- b. Menetapan masa berlaku uji.

5. Jika dinyatakan Tidak Lulus Uji, Koordinator Penguji Kendaraan Bermotor meregistrasi (pendataan) dan menyampaikan kepada pemohon, antara lain:

- a. Alasan-alasan teknis penolakan yang dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memerintah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan alasan penolakan; Menetapkan tanggal Uji Ulang berikutnya
- c. Menyerahkan lampiran fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan kepada Koordinator bagian penerima pelayanan/pendaftaran (Loket Pendaftaran).

Jika dinyatakan Lulus Uji, Koordinator Pengujian Kendaraan bermotor menyerahkan berkas surat dan fomulir daftar Pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan kepada Koordinator bagian pengecatan Pelat samping dan Pengetokan Pelat Uji

6. Koordinator bagian pengecatan/pembuatan pelat samping dan pengetokan pelat uji menerima fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan dari Koordinator Penguji Kendaraan Bermotor, melakukan kegiatan :

- a. Pembuatan pelat samping kendaraan,

- b. Pengetokan dan pemasangan pelat uji;
 - c. Membubuhi paraf pada fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan sebagai tanda kegiatan telah dilaksanakan;
 - d. Menyerahkan kembali fomulir Daftar Pemeriksaan kendaraan kepada Koordinator bagian Pengujian Kendaraan bermotor.
7. Koordinator bagian Pengujian Kendaraan Bermotor menerima fomulir Daftar pemeriksaan kendaraan dari Koordinator bagian pengecatan/pembuatan pelat samping dan pengetokan pelat uji, selanjutnya melakukan kegiatan :
- a. Menetapkan tanggal masa berlaku uji kendaraan;
 - b. Menandatangani buku uji;
 - c. Menyerahkan buku uji kepada pemilik/pemegang kendaraan sebagai proses pengujian telah selesai dilaksanakan dan kendaraan siap operasi;
 - d. Menyerahkan semua berkas surat dan formulir Daftar Pemeriksaan kendaraan kepada Koordinator bagian penerima pelayanan/pendaftaran serta Kartu Induk Pemeriksaan kendaraan kepada Koordinator bagian pengelolaan KIP untuk di inventarisasi dan pendataan

Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah selanjutnya ditambah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan bermotor dan peraturan menteri perhubungan nomor PM 133 tahun 2015 Tentang pengujian kendaraan bermotor serta peraturan daerah Kabupaten rokan hilir Nomor 18 tahun 2021 tentang retribusi pengujian kendaarn bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 7, 10 menunjukkan bahwa tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

Tabel I.1 :TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Pengujian Berkala

a. Kendaraan Barang Kecil (Pick-Up JBB s/d 2500 Kg)

No	KOMPONEN	TARIF
1.	Administrasi Pengujian	Rp. 20.000,-
2.	Jasa Uji	Rp. 30.000,-
3.	Cetak Bukti Lulus Uji	Rp. 20.000,-
Jumlah		Rp. 70.000,-

b. Kendaraan Barang Kecil (Pick-Up JBB 2501 s/d 5000 Kg)

No	KOMPONEN	TARIF
1.	Administrasi Pengujian	Rp. 20.000,-
2.	Jasa Uji	Rp. 50.000,-
3.	Cetak Bukti Lulus Uji	Rp. 20.000,-
Jumlah		Rp. 90.000,-

c. Kendaraan Barang (JBB 5001 s/d 8000 Kg)

No	KOMPONEN	TARIF
1.	Administrasi Pengujian	Rp. 20.000,-
2.	Jasa Uji	Rp. 80.000,-
3.	Cetak Bukti Lulus Uji	Rp. 20.000,-
Jumlah		Rp. 120.000,-

d. Kendaraan Barang (JBB 8001 s/d 16.000 Kg)

No	KOMPONEN	TARIF
1.	Administrasi Pengujian	Rp. 20.000,-
2.	Jasa Uji	Rp. 120.000,-

3.	Cetak Bukti Lulus Uji	Rp. 20.000,-
Jumlah		Rp. 160.000,-

e. Kendaraan Barang (JBB diatas 16.000 Kg)

No	KOMPONEN	TARIF
1.	Administrasi Pengujian	Rp. 20.000,-
2.	Jasa Uji	Rp. 150.000,-
3.	Cetak Bukti Lulus Uji	Rp. 20.000,-
Jumlah		Rp. 190.000,-

Sumber : UPT pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Kabupaten Rokan Hilir, 2022

Adapun jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala pertama dan ulangan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.2: REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN UJI BERKALA PERTAMA DAN BERKALA ULANGAN PADA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR

No	JENIS KENDARAAN		TAHUN 2020		
			Pertama	Berkala Ulangan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	MOBIL PENUMPANG	Sedan/Taksi	0	0	0
		Oplet	0	0	0
		Station Wagon	0	0	0
		Bajai/Becak Motor	0	0	0
2.	Mobil Bus	Mini Bus	7	68	75
		Bus	0	13	13
3.	Mobil Barang	Pick-Up	185	68	253
		Blind Van	0	13	75

		Bestle Wagon	0	3008	3008
		Truck SB 2	19	0	19
		Truck SB 3	0	0	0
		Truck SB 4	0	2119	2119
		Truck SB 5	0	300	300
		T. Tangki SB 2	0	36	36
		T. Tangki SB 3	0	0	0
		T. Tangki SB 4	0	0	0
		T. Tangki SB 5	0	0	0
		Tracktor Head	0	0	0
1	2	3	4	5	6
4.		Kereta Tempelan	0	1	1
5.		Kereta Gandengan	0	0	0
6.		Kendaraan Khusus	0	0	0
		JUMLAH TOTAL			5837

Sumber : UPT pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, 2022

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kendaraan yang melaukan uji berkala ulang pada upt pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan kabupaten rokan hilir dari tahun 2020 jumlah keseluruhan kendaraan yang diuji secara berkala sebanyak 5.837 unit kendaraan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan secara drastis pada uji berkala kendaraan bermotor sebanyak 3.671 unit kendaraan. Hal ini penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk menguji kelaikan kendaraannya yang aman, nyaman dan keselamatan berkendara di jaalan raya umum, serta kurangnya perhatian aparaturnegara dalam hal ini dinas terkait seperti dinas perhubungan dan polisi lalu lintas.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor masih mempunyai permasalahan antara lain:

1. Sumber daya manusia masih kurang dalam hal pengujian kendaraan bermotor
2. Alat uji yang ada di kabupaten rokan hilir lengkap tetapi perlu adanya pembaharuan karna alat yang ada masih konvensional atau jadul, karena peraturan saat ini mengharuskan menggunakan SIM-PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor/Alat Elektronik).
3. PP No.55 Tahun 2012 mewajibkan setiap UPTD pengujian kendaraan bermotor harus terhubung dan terintegrasi dengan kementerian yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang perlu dibenahi dalam hal pemeriksaan (pengujian kembali) kendaraan bermotor di jalan atau yang dikenal dengan nama uji petik laik jalan atau inspeksi terhadap angkutan umum yang belum maksimal.
4. Masih adanya masyarakat yang ingin mempercepat proses tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Jika melakukan pengujian kendaraan bermotor tanpa melalui proses yang telah ditetapkan maka akan mengakibatkan kecelakaan pada pengendara kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas yang ditemukan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD**

Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian ataupun latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, pokok permasalahannya adalah, **”Bagaimanakah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir?”.**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk mengetahui Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini :

1. Kegunaan Akademik yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian dengan variabel yang sama dengan penulis

2. Kegunaan Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat mengacu pengembangan ilmu administrasi pada umumnya dan administrasi publik pada khususnya, minimal dapat memperkaya inventaris hasil penelitian di bidang pelayanan publik di pemerintahan birokrasi.
3. Kegunaan Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tentang pengujian kendaraan bermotor.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan teori dan konsep yang ada relevansinya dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1. Konsep Administrasi

Secara umum, manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Manusia, di sisi lain, memiliki tujuan hidup yang sederhana dan sangat kompleks. Karena manusia saling membutuhkan, maka manusia secara sadar saling membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai ini, upaya kolaboratif telah muncul untuk mencapai apa yang diinginkan semua orang. Misalnya, jika kita selidiki dengan jelas, barang-barang yang kita pakai sekarang, seperti celana, kemeja, sepatu, sapatangan, sisir, sabun, tentu bukan buatan kita. Mungkin kita bisa membuat baju, tapi bahan atau kainnya dibuat oleh orang lain. Atau untuk mengeksplorasi lebih jauh, mungkin kita bisa menenun atau membuat kain dari kapas, yang diekstraksi dari pohon kapas yang tumbuh di sekitar kita.

Namun, untuk merajut atau menenun menjadi kain, kita tetap membutuhkan alat atau fasilitas yang dibuat oleh orang lain, seperti jarum atau alat tenun itu sendiri. Jadi kita perlu bantuan orang lain untuk mendapatkan atau

membeli barang yang diperlukan. Jika kita perhatikan lebih dekat, kita menemukan bahwa hampir semua barang di rumah kita dibuat oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri.

Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Contoh-contoh ini memberi tahu kita bahwa banyak kebutuhan hidup manusia diperoleh melalui aktivitas atau pekerjaan orang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia selalu terlihat aktivitas dari waktu ke waktu, adanya manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dan fenomena ini membentuk pengertian administrasi.

Oleh karena itu, administrasi mengacu pada aktivitas sekelompok orang yang bekerja bersama secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang saja untuk mencapai tujuannya tentu tidak disebut administrasi. Selanjutnya pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama tetapi tidak teratur, tidak terencana dan sesuka hati tidak dapat dikatakan sebagai pekerjaan administrasi. Kegiatan tanpa tujuan juga tidak dapat mengarah pada kegiatan yang disebut administrasi. Tidak semua kegiatan kerja sama disebut juga administrasi.

Dengan semakin dikenalnya istilah administrasi oleh masyarakat Indonesia, muncul masalah-masalah baru terutama menyangkut apakah istilah yang sudah terlanjur diketahui dan dikenal itu memberikan pengertian yang tepat sesuai dengan kriteria yang ada? Dengan kata lain, apakah istilah administrasi mempunyai kesamaan persepsi di antara mereka yang

mengetahuinya? Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pengertian administrasi, yaitu dilihat dari penggunaannya dan bidang kajian administrasi. Yang pertama adalah pengertian administrasi dalam arti sempit, yaitu administrasi dinilai sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kertas, pekerjaan tulis-menulis, korespondensi, dokumentasi atau pembayaran. Sementara itu, kedua pengertian administrasi dalam arti luas, yaitu administrasi tidak sekadar pekerjaan membuat surat, mengirim surat, menyimpan dokumen, membayar rekening, dan pekerjaan ketik-mengetik saja, melainkan segenap kegiatan penataan atau pengaturan yang dilakukan untuk menata dan menjalin kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Kegiatan seperti itu mencakup aspek-aspek seperti pengaturan atau pembagian pekerjaan serta orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, merencanakan serta melaksanakan kegiatan, memimpin serta mengatur pegawai beserta sarana dan prasarana yang dimiliki, mengelola bidang kepegawaian, mengelola keuangan, perbekalan, serta perlengkapan lainnya sampai dengan usaha untuk menjalin kerja sama dengan orang lain secara baik atau membina hubungan yang di antara orang-orang yang bekerja dalam suatu kelompok dengan lingkungan kerjanya. Kegiatan yang sangat luas tersebut dapat dilihat apabila administrasi dijabarkan dalam unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dengan demikian, pengertian

administrasi secara utuh akan dapat lebih diketahui dan dipahami secara teratur dan konsisten.

Istilah administrasi dalam bahasa Inggris disebut dengan administration. Sedangkan istilah administrasi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin “*ad+ministrare*“ yang merupakan bentuk kata kerja yang di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan membantu, melayani, menunjang atau memenuhi. Sedangkan kata sifat dari *ad+ministrare* adalah *administrativus*, dan kata bendanya adalah *administratio*. Dalam penerapan istilah administrasi, pengaruh penjajah Belanda sangatlah kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Istilah administrasi lebih dikenal dan sering digunakan karena penerjemahannya berasal dari bahasa Belanda yaitu *administatie*, yang untuk lidah bangsa Indonesia terasa lebih mudah dan hampir sama. Dalam perkembangan selanjutnya penerjemahan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *administration* tidak digunakan sehari-hari dalam percakapan oleh orang Indonesia, kecuali sewaktu dibicarakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kedua istilah itu, yang satu berasal dan diterjemahkan dari bahasa Inggris, sedangkan yang lainnya merupakan terjemahan atau warisan dari peninggalan Belanda mempunyai arti yang berbeda satu dengan lainnya.

Pada dasarnya kebutuhan manusia bersifat jamak, yaitu membutuhkan lebih dari satu orang. Namun, tidak semua tujuan tersebut dapat dicapai oleh manusia sendiri, apalagi dengan kesulitan atau kebutuhan yang intens yang seringkali di luar kemampuan individu untuk mencapainya sendiri. Oleh

karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seseorang perlu mencari bantuan dari orang lain atau dengan orang lain untuk mencapai kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Proses kolaboratif terjadi karena kebutuhan yang harus dipenuhi melibatkan orang lain. Oleh karena itu, jalannya kegiatan yang secara teratur dilakukan manusia dalam kehidupan ini untuk mencapai tujuannya. Di bawah ini diberikan konsep administrasi oleh beberapa pakar administrasi :

The Liang Gie (1993) dijelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penataan pada pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam rangkaian kegiatan yang termasuk kedalam kategori administrasi, meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dilakukan secara rasional oleh sekelompok orang (dua atau lebih)
2. Administrasi adalah proses kerja sama
3. Dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu

Thoha, (1990) menerangkan bahwa administrasi yang berasal dari bahasa Belanda mempunyai arti sebagai berikut: *“elke stelselmatige ordening en schriftelijke vastlegging van gegevens, samengesteld met het doel een oversight van deze gegevens te verkrijgen in hun geheel en hun orderling verband”* yang artinya: ”setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain”.

Admosudirdjo dalam zulkifli (2009:9) menjabarkan administrasi adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atas usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.

Brooks Adams dalam Syafiie (2003:4) menjelaskan bahwa administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan social yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan. Dari Batasan tersebut ditemukan ide pokok sebagai berikut :

1. Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan social di dalam suatu organisasi
2. kekuatan itu dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisasi.

Siagian (2003:2) mendefenisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas rangkaian kegiatan sebagai proses penhgendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan Bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni organon atau “alat”. Secara konseptual terdapat dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi (*organization*) sebagai kata benda, yakni wadah sekelompok

orang untuk mencapai tujuan bersama dan pengorganisasian (*organizing*) sebagai kata kerja, yakni suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen.

Konsep organisasi nampaknya merupakan titik pusat dari maksud dan tujuan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sebagian para ahli mengartikan organisasi secara sempit yaitu sebagai alat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan.

Syafri (2012:12) Menjelaskan bahwa organisasi adalah unsur utama dari suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, karena organisasi merupakan wadah (tempat) untuk mengelompokkan orang dan membagi tugas, serta tempat berbagai kegiatan (proses) untuk mencapai tujuan. Sebagai wadah, organisasi adalah suatu bentuk struktur kotak yang menggambarkan suatu hierarki, jabatan seseorang, pengelompokan orang dan pekerjaan, serta pola hubungan antar bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai suatu proses menggambarkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mathis and Jackson dalam Rernawan (2011:15) mengatakan organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu

sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan.

Louis A. Allen dalam Hasibuan, (2014:24-25) menjelaskan bahwa organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Robbins dalam Sobirin (2007:5-7) berpendapat bahwa organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Robbins (1994:4) menetapkan struktur organisasi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Kompleksitas adalah mempertimbangkan tingkat diferensi yang ada dalam organisasi. Termasuk didalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkat didalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.
2. Formalisasi adalah tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari pada pegawainya.

3. Sentralisasi adalah mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan. Dibeberapa organisasi, pengambilan keputusan dengan disentralisasi. Masalah-masalah dialirkan keatas, dan para eksekutif senior memilih tindakan yang tepat. Pada kasus lainnya pengambilan keputusan didesentralisasi.

3. Konsep Manajemen

Kata manajemen mengambil konsep kata manage dari bahasa Inggris yang berarti mengelola, mengatur dan merencanakan. Secara garis besar konsep manajemen memang mengajarkan tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala aktivitasnya bisa terkontrol dengan baik. Orang yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan disebut sebagai seorang manajer. Dia harus menguasai konsep manajemen dengan baik, bukan hanya sebatas teori tapi juga prakteknya di lapangan.

Dalam hal manajemen, ada lima elemen yang harus ada agar perusahaan dapat berfungsi dengan baik. Kelima elemen tersebut meliputi tenaga kerja, material, mesin, waktu, dan keuangan. Jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka pengelolaan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Harold Koontz dan Heinz Weihrich (2007:27) menerangkan bahwamanajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu, yang bekerja bersama dalam kelompok, secara efisien mencapai tujuan yang dipilih.

Robert L. Trewelly dan M. Gene Newport (2006:57) memberikan penjelasan manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan,

pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

Kreitner (2005:97) menguraikan bahwa manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah.

Kotler (2007:87) menjelaskan perihal bahwa konsep manajemen dipandang sebagai :

1. Sebagai pengetahuan : manajemen merupakan acuan atau landasan ilmu keputusan dalam organisasi dan kehidupan manusia. Melalui manajemen, dimungkinkan untuk mengukur dan mengevaluasi mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.
2. Sebagai seni : manajemen lebih dari sekadar teori, ia bergerak gesit seperti seni yang terkadang tak terduga. Saat berada di lapangan, manajemen harus mampu merespon secara fleksibel semua tantangan.
3. Sebagai profesi : ini mengacu pada pekerjaan manajer atau eksekutif yang bekerja secara profesional untuk sebuah perusahaan dan dibayar berdasarkan keahlian mereka.
4. Sebagai proses : Sesuai dengan arti kata, manajemen adalah suatu cara pengelolaan, yang artinya memerlukan waktu untuk mencapai hasil yang

diinginkan. Proses ini erat kaitannya dengan fungsi manajemen di dalam perusahaan.

Robert L. Trewelly dan M. Gene Newport (2006:127) menguraikan bahwa fungsi konsep manajemen sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengejar tujuan dan sasaran, diperlukan perencanaan agar semua proses dapat diukur dan dipantau. Perencanaan menunjukkan setiap langkah dengan jelas menguraikan ide dan praktik di lapangan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tanpa pengaturan yang baik, rencana tidak akan berhasil. Proses ini mendelegasikan tugas kepada orang-orang dengan pengetahuan khusus sehingga mereka bisa efektif dan mencapai tujuan mereka.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Tugas manajemen dalam hal ini manajer adalah menginstruksikan timnya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Manajer bertanggung jawab atas proses memberikan arahan dan menyetujui proses tersebut.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Ketika semua rencana telah dijalankan, langkah selanjutnya adalah pemantauan. Hal ini perlu dilakukan agar setiap proses tidak maksimal atau menyimpang dari rencana awal. Dalam hal ini, manajer juga secara berkala mengevaluasi rencana yang ada.

4. Konsep Sumber Daya Manusia

Untuk memahami pengertian Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana sumber daya manusia berasal dari kata Daya (Energi), daya dalam konteks sumber daya manusia adalah kekuatan dalam arti kemampuan untuk membangun, artinya “membangun”, melakukan kegiatan pembangunan yang sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Mampu membangun berarti mempunyai daya (Energi) untuk bekerja dengan baik, profesional, dan penuh tanggung jawab. Semua itu mengandung makna bahwa tidak setiap manusia bisa diartikan sebagai sumber daya manusia. Hanya manusia yang mempunyai daya dalam arti kemampuan untuk maju positif itulah yang dapat disebut sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagaimana fungsi dalam organisasi yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Secara sederhana efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang minimum untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu, baik dalam arti jumlah maupun mutunya. Berarti tingkat efisiensi semakin tinggi apabila semakin sedikit sumber daya, dan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa tertentu. Sedangkan efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana

dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Siagian (2013;21) empat hal orientasi kerja efektivitas yaitu:

- a. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi
- b. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan.
- c. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan.
- d. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Marihot Tua (dalam Sunyoto, 2012;1) mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan peeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kinggudu (dalam Sunyoto, 2012;2) mendefinisikan sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personel bagi pencapaian yang efektif mengenai sarana-sarana dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional.

Menurut Nawawi (dalam Sedarmayanti 2007:207) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material atau non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik alam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber daya manusia dalam manajemen atau organisasi merupakan hal yang strategis dalam organisasi, karena pengaruh (impact). Pemberdayaan sumber daya manusia yang sangat signifikan strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktivitas organisasi dan manajemen sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsip sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan besar sulit mencapai tujuan. Sumber daya manusia dipahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada dalam organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Unsur-unsur sumber daya manusia meliputi:

1. Kemampuan-kemampuan (*capabilities*)
2. Sikap (*attitudes*)
3. Nilai-nilai (*values*)
4. Karakteristik-karakteristik demografis (*demographic characteristics*)

5. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan tanda ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2003:53) mengemukakan

batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan.

Pelaksana adalah orang yang melaksanakan atau melakukan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarmita di atas, maka jelas dapat dibedakan antar pengertian pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana.

Hersey dan Blancard dalam Sudjana (2004:114) mengemukakan bahwa pelaksanaan (*actuating* atau *motivating*) adalah Kegiatan meningkatkan keadaan dapat secara langsung mengarahkan dorongan-dorongan dalam diri seseorang kepada kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George R Terry dalam Terry (2013: 17) mengemukakan bahwa pelaksanaan (*actuating*) adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk Tercapainya tujuan perusahaan dan anggota perusahaan terkait sehingga tergerak untuk mencapai tujuan tersebut.

Jadi menurut pemahaman para ahli tersebut di atas penerapan teori pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang mendorong atau menggerakkan satu orang atau semua anggota kelompok untuk berusaha mencapai suatu tujuan atau maksud yang telah ditentukan.

Pelaksanaan menurut The Liang Gie (dalam adisasmita,2011,24) sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Pelaksanaan juga disebut pergerakan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Adisasmita, 2011,24) merumuskan pengertian pelaksanaan atau pergerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Sastropetro (2002:183) menyatakan bahwa pelaksanaan didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Kemudian Siagian (2003:120) menyatakan bahwa jika rencana itu telah dilaksanakan dan dirumuskan, dan program kerja yang "*achievement oriented*" telah dirumuskan, yang tersisa sekarang hanyalah menjalankannya. Selain itu, Siagian menyampaikan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Membuat rencana detail, yaitu mengubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek), mengatur sumber daya dan orang, dan kemudian menetapkan aturan dan prosedur tertentu.

- b. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencan praktis, dan tujuan selanjutnya adalah membagi tugas dan sumber daya yang dibutuhkan.
- c. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini perlu untuk memeriksa hasil yang diperoleh.
- d. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya jika da penyimpangan diharapkan dapat diberikan saran dan perbaikan.

Faktor pelaksanaan memegang peranan paling penting dalam menentukan keberhasilan rencana yang akan dilaksanakan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (2000:199) beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Penting untuk secara jelas mendefinisikan siapa atau lembaga mana yang akan diberdayakan secara fungsional untuk mengkoordinasikan program-program dalam sektor tersebut.
- b. Perlu berhati-hati untuk mengembangkan rencana implementasi yang jelas. Dalam pelaksanaanya, prinsip-prinsip dasar fungsional perlu dimasukkan ke dalam serangkaian prosedur yang terkoordinasi, jelas, dan ditaati dalam hubungan antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

- c. Hubungan kerja yang lebih baik harus dikembangkan, termasuk badan-badan yang bekerja sama atau komite yang bekerja sama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
- d. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan di atas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah kegiatan dalam proses pencapaian rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian, minat dan kemampuan pelaku dan kelompok sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan suatu usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan yang direncanakan telah disiapkan dengan cermat dan rinci, biasanya setelah rencana dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan menurut norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan

kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara pelaksanaannya, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa rencana yang ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya harus memenuhi kondisi yang ada, baik di dalam maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan upaya dan didukung oleh alat-alat pendukung.

Pelaksanaan (actuating) itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara efektif dan efisien. Jadi artinya adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakkan seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Anggowo (2008:65)

Pelaksanaan menurut Abdullah (1987:5) adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis atau operasional

atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usah-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Menurut Edward, dalam Abdullah (1987:40), ada beberapa faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

6. Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)".

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat

atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Badan-badan ini melaksanakan pekerjaan pemerintah yang berdampak pada warganya. Namun dalam praktiknya, instansi pemerintah sering dihadapkan pada pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, yang membuat mereka tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, tetapi dapat juga berupa perintah eksekutif penting atau keputusan yudikatif.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui beberapa tahapan tertentu, seperti pengesahan Undang-undang, diikuti dengan keluaran kebijakan berupa keputusan pelaksanaan, dan lain-lain, hingga kebijakan yang bersangkutan diperbaiki.

B. Kerangka Pikiran

Sesuai dengan konsep dan teori yang telah dikemukakan, kerangka pikir dapat menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis

Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir. Melalui bagan sebagai berikut:

Gambar II.1: Kerangka pikiran Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber : Data Modifikasi Peneliti, 2022

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Administrasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah dimana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Angkutan barang/mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Merupakan tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana
9. Sumber Daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan

keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

10. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementor program

11. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program

D. Operasional Variabel

Untuk mempermudah arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan enam indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada table di bawah ini:

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah	Pelaksanaan Pengujian	1. komunikasi	1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

<p>dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakannya. The Liang Gie (dalam adismita,2011,24)</p>		3.	<p>Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan pengujian kendaraan.</p>	
		2. Sumber Daya	<p>1. Menyediakan penguji yang berkualitas sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor. 2. Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. 3. Menyediakan anggaran yang memadai untuk pengadaan/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>
		3. Disposisi	<p>1. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan pengujian kendaraan bermotor. 2. Respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>

				lak san a
		4. Struktur Birokrasi	1. Melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP. 2. Memiliki alat pengujian Kendaraan Bermotor sesuai SOP. 3. Kompetensi Pegawai pelaksana pengujian yang sesuai SOP.	Terlaksan a Cukup Ter lak san a Kurang g Ter lak san a

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir, maka dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi dikatakan:

Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksanadengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\geq 67-100\%$

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\leq 1-33\%$

2. Sumber Daya dikatakan:

Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\geq 67-100\%$

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\leq 1-33\%$

3. Disposisi dikatakan:

Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\geq 67-100\%$

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\leq 1-33\%$

4. Struktur Birokrasi dikatakan:

Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\geq 67-100\%$

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh indikator variabel dalam penelitian telah terlaksana dengan baik dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah $\leq 1-33\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah:

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan ialah kuantitatif dengan format deskriptif.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Nanang Martono (2005:215), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Metode kuantitatif yang biasanya menggunakan logika deduktif berupaya mencari keteraturan dalam kehidupan manusia, dengan memisahkan dunia sosial menjadi komponen-komponen empiris yang disebut variabel. Dan berusaha menjawab suatu penelitian tentang "Bagaimanakah Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir?"

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan karena instansi ini merupakan tugas dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian diberi kewenangan kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga pada instansi ini sangat dibutuhkan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai suatu program yang efektif dan efisien.

Adapun pertimbangan penulis memilih Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir karena diketahui jumlah populasi dan perkembangan transportasi terus berkembang pesat, masih banyak pemilik kendaraan yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor. Hal ini perlu diperhatikan dengan baik dan benar sehingga lebih optimal dan tidak terjadi penyimpangan dan terjadi kecelakaan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2012:80). Populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Jadi jumlah populasinya sebanyak 3.671 responden pada uji berkala tahun 2021.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah proses pemilihan beberapa obyek atau unsur dalam populasi untuk di gunakan sebagai sampel yang akan diteliti sifat-sifatnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi dan harus mewakili (representative) populasinya sehingga dapat menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat populasi yang bersangkutan.

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel tentang Pelaksanaan Pengujian pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	2	3	4	5

1	Kepala UPTD	1	1	100%
2	Kasubag TU	1	1	100%
3	Staf Penguji	1	1	100%
4	Staf Pemeriksa	1	1	100%
1	2	3	4	5
5	Staf administrasi Pengujian	6	6	100%
6	masyarakat Pengurusan Kir	50	30	80%
	Jumlah	60	40	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 40 orang, yaitu terdiri dari 1 orang kepala UPTD, 1 orang Kasubag TU, 1 orang Staf Penguji, 1 orang Staf Pemeriksa, 6 orang Staf Administrasi Pengujian, dan 30 orang masyarakat yang melakukan pengurusan KIR.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Acidental Sampling, dimana menurut Sugiyono (2009:96) Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik Purposive Sampling ini ditujukan kepada 30 orang masyarakat yang melakukan pengurusan Kir.

Kemudian peneliti juga menggunakan Teknik Sensus dalam pengambilan sampel, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik sensus ini ditujukan kepada pegawai Kantor UPTD pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung, yaitu sebanyak 8 orang. Untuk Kepala Kantor UPTD,

Kasubag TU, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Kemudian untuk 30 orang responden lainnya, peneliti menggunakan teknik kuesioner dalam mengumpulkan data.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini jenis sumber data yang diperlukan adalah :

- a. Data primer adalah data diperoleh langsung dari responden peneliti lapangan, berupa informasi dari wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung.
- b. Data sekunder adalah Data yang diperoleh berupa dokumen, arsip, buku, dan lain-lain dapat berupa kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, atau: peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berupa informasi yang relevan yang dapat mendukung pokok bahasan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.
2. Kuisisioner, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat atau menyusun daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh orang yang diwawancarai. Pengisian responden pegawai dan masyarakat yang dipilih sebagai sampel.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi di lapangan dan berkaitan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat dokumen atau arsip yang ada yang relevan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2012:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Teknik analisis ini juga merupakan metode analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara keseluruhan tentang suatu keadaan atau masalah yang terjadi pada subjek penelitian. Analisis berusaha memberikan gambaran rinci berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisis tabel dan deskripsi, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan penelitian berdasarkan prosedur ilmiah.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-											
		2021 - 2022											
		Agu-Nov			Des-Feb			Mar-Mei			Jun-Agu		
1	Penyusunan UP												
2	Seminar UP												
3	Penyusunan Kuisi UP												
4	Penyusunan Kuisisioner												
5	Rekomendasi Survey Lapangan												
6	Analisis Data												
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)												
8	Konsultasi Revisi Skripsi												
9	Penyusunan Konfrehensip Skripsi												
10	Pengiriman Skripsi												

Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Pedoman Peneliti UP FISIPOL-UIR, 2022

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Rokan Hilir

1. Geografis

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1014' - 2030' LU dan 100016' - 101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km², dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km². Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai uraian berikut:

- a. Sebelah utara: Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- b. Sebelah selatan: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebelah Timur: Kota Dumai
- d. Sebelah Barat: Propinsi Sumatera Utara

Dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 16 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pempong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Diantara sungai-sungai tersebut yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Rokan dengan panjang 350 kilo meter.

Tabel IV.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 2020

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	2	3	4
1	Tanah Putih	Sedinginan	1 915,23
2	Pujud	Pujud	984,90
3	Tanah Putih Tj Melawan	Melayu Besar	198,39
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231,13
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	-
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847,35
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445,55
8	Bagan Sinembah	Bagan Sinembah	-

	Raya	Raya	
9	Balai Jaya	Balai Jaya	-
1	2	3	4
10	Kubu	Teluk Merbau	385,36
11	Pasir Limau Kapas	Panipahan	669,63
12	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri	675,70
13	Bangko	Bagansiapiapi	475,26
14	Sinaboi	Sinaboi	335,48
15	Batu Hampar	Bantayan	284,31
16	Pekaitan	Pedamaran	465,30
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235,48
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732,52
Rokan Hilir			8 881,59

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2022

2. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hilir mengalami pemekaran kecamatan dari lima kecamatan ketika berpisah dari Kabupaten Bengkalis tahun 1999 menjadi enam belas kecamatan hingga tahun 2014 yaitu: Tanah Putih, Pujud, Rantau Kopar, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanjung Medan, Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Kubu, Pasir Limau Kapas, Kubu Babussalam, Bangko, Sinaboi, Batu Hampar, Pekaitan, Rimba Melintang, dan Bangko Pusako.

Tabel IV.2 Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	kelurahan
1	2	3	4	5
1	Tanah Putih	Sedinginan	1	3
2	Pujud	Pujud	1	1
3	Tanah Putih Tj Melawan	Melayu Besar	5	1

4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	2	2
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	1	-
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	1	2
1	2	3	4	5
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	5	1
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	1	1
9	Balai Jaya	Balai Jaya	9	2
1	Kubu	Teluk Merbau	9	1
1	Pasir Limau Kapas	Panipahan	7	1
1	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri	1	-
1	Bangko	Bagansiapiapi	1	5
1	Sinaboi	Sinaboi	5	1
1	Batu Hampar	Bantayan	4	1
1	Pekaitan	Pedamaran	1	-
1	Rimba Melintang	Rimba Melintang	1	1
1	Bangko Pusako	Bangko Kanan	1	2
Rokan Hilir			1	25

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2022

3. Penduduk

Menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir adalah 637.161, dengan 327.243 penduduk laki-laki dan 309.918 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,38% dibandingkan sensus tahun 2010. Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan pada tahun 2020 adalah 106. Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 mencapai 72 jiwa/km², dengan rata-rata 4 jiwa per rumah tangga. Kepadatan

penduduk di 18 ruas jalan tersebut sangat bervariasi, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Bongo sebesar 166 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 29 jiwa/km².

Tabel IV.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Penduduk
1	Tanah Putih	Sedinginan	69150
2	Pujud	Pujud	33954
3	Tanah Putih Tj Melawan	Melayu Besar	14628
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	6592
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	36282
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	69825
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	24821
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	20150
9	Balai Jaya	Balai Jaya	53404
10	Kubu	Teluk Merbau	25616
11	Pasir Limau Kapas	Panipahan	37258
12	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri	23836
13	Bangko	Bagansiapiapi	78742
14	Sinaboi	Sinaboi	18373
15	Batu Hampar	Bantayan	9448
16	Pekaitan	Pedamaran	15858
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang	37624
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan	61600
Rokan Hilir			637.161

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2022

B. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Umum UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kantor yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang mana kantor tersebut di bawah naungan cabang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dan digunakan sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor.

Dimana pada awalnya kantor tersebut belum bernama kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan

Hilir, kantor tersebut bernama kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan akhirnya dengan otonomi daerah tentang Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Rokan Hilir berdiri melalui proses konsolidasi wilayah pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Rokan Hilir semakin berkembang baik dari segi administrasi maupun SDM karyawannya serta sistem yang digunakan.

Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai luas lahan 10.000 M2.

2. Visi dan Misi, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

a. Visi

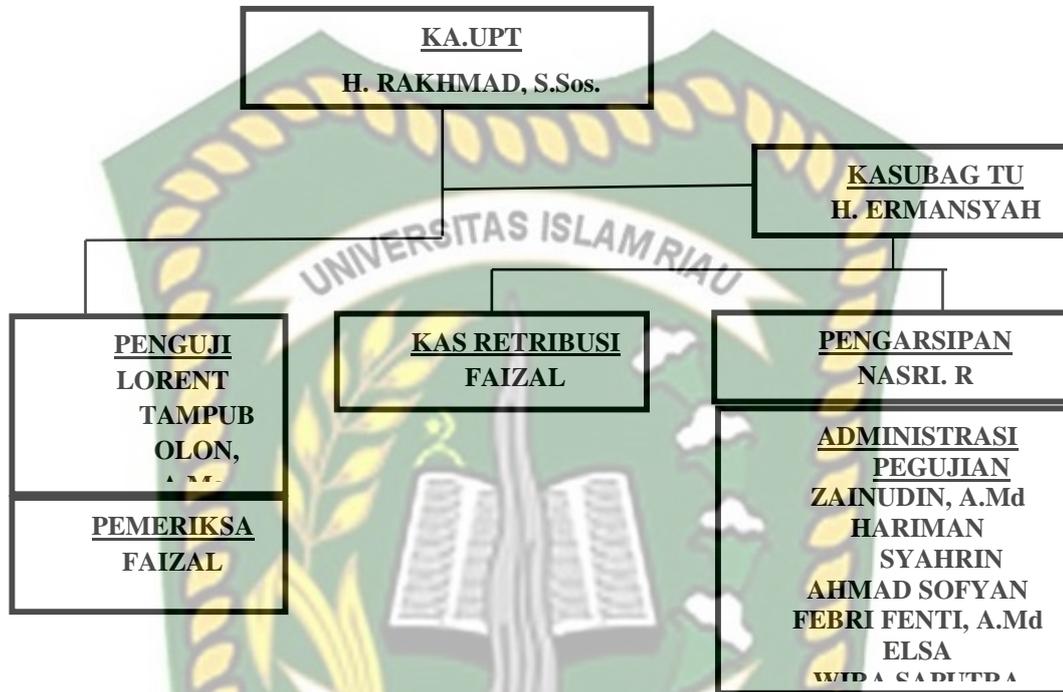
“Mewujudkan Kendaraan Bermotor yang laik jalan”

b. Misi

1. Terwujudnya SDM yang Profesional
2. Terwujudnya peralatan uji yang akurat
3. Terwujudnya sistem pelayanan masyarakat yang prima

3. Struktur Organisasi UPT Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubunga Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 1.1: Struktur Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : *UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir*

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pegawai UPT Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 1 kepala UPT, 1 Kasubag TU, dan 10 pegawai di berbagai bidang yang ada di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

4. Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Pegawai

Tabel IV.4 :SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN KOMPETENSI PENGUJI

a. SDM Penguji

NO	NAMA	NIP/NRP	KOMPETENSI	PENDIDIKAN FORMAL
1	LORENT TAMPUBOLON, A.Ma.PKB	NRP.014.007.PT3.01.001	PENGUJI TINGKAT 4	D2 PKB
NO	NAMA	NIP/NRP	KOMPETENSI	PENDIDIKAN FORMAL
2	FAIZAL	NRP.014.007.PP1.01.001	PEMBANTU PENGUJI	STM

b. SDM Adminintrasi

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PENDIDIKAN FORMAL
1	H. RAKHMAD, S.Sos,M.Si	19730127 199203 1 001	Kepala UPT	S2
2	H. ERMANSYAH	19700405 199203 1 007	Kasubbag TU UPT	SMA
3	ZAINUDDIN, A.Md	19711019 200212 1 001	Pelaksana	D3
4	NASRI	19650724 199103 1 002	Pelaksana	SMA
5	AHMAD SOFYAN	19790408 200904 1 005	Pelaksana	SMA
5	H. HARIMAN SYAHRIN	19801110 201001 1 014	Pelaksana	SMA
7	FEBRI FENTI, A.Md	-	Pelaksana	D3
8	WIRA SAPUTRA	-	Pelaksana	SMA
9	ELSA KURNIA WATI	-	Pelaksana	SMA

Sumber: UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

5. Tugas dan Fungsi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Dibawah ini merupakan tugas dari bagian atau seksi seksi yang ada di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Adapun tugas kepala UPT yaitu:

- a. menyusun dan menyiapkan bahan untuk program kegiatan yang berhubungan dengan seksi pengujian kendaraan bermotor;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan pemeriksaan dan perawatan alat uji kendaraan bermotor;
- c. menyusun standar kebijakan teknis terhadap penggunaan jalan yang dilalui oleh kendaraan berat, berdimensi besar serta kendaraan yang muatan lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menginventarisir dan menyusun bahan untuk kebutuhan administrasi dan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
- e. menyusun bahan untuk rencana kebutuhan perawatan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- f. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
- g. menyusun dan mengelola penyajian data kendaraan yang melakukan uji berkala yang beroperasi di wilayah kabupaten;
- h. menginventarisasi permasalahan, melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas dari Kasubag TU yaitu:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Menyiapkan bahan bahan yang diperlukan untuk penyusunan rencana kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan UPT, serta menyajikan alternatif penyelesaiannya.

Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang ada pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dan membuat alternatif penyelesaiannya yang selanjutnya dilaporkan kepada kepala UPT.

e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan ;

1. Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan
2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas
3. Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

Uraian tugas dari pengelola perizinan yaitu:

a. Menyampaikan persyaratan perizinan kepada masyarakat.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara pengurusan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus perizinan.

b. Memeriksa kelengkapan berkas administrasi perizinan yang diteruskan ke pimpinan. Melakukan telaah dan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah diberikan untuk mengurus perizinan, jika telah terpenuhi maka diteruskan ke pimpinan.

c. Menyusun rencana kebutuhan perizinan.

Membuat rencana kebutuhan yang terkait dengan perizinan dan diajukan melalui kantor dinas.

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang telah diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

1. Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan
2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas

3. Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

Uraian tugas dari pengelolaan data:

a. Mencatat dan menghimpun data berkas pengurusan KIUR kendaraan bermotor. Menghimpun berkas administrasi berupa daftar penjelasan untuk di input menggunakan komputer.

b. Membuat dan menyiapkan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK), Berita Acara Pemeriksaan Jenis Kendaraan (BAPJK) untuk kelengkapan pengurusan KIUR kendaraan bermotor.

Membuat SPJK dan BAPJK menggunakan form yang telah disediakan, dan dicetak menggunakan printer dot metrik. Kemudian diserahkan kepada penguji untuk diperiksa dan ditangani.

c. Membuat surat yang bersifat kedinasan serta menginventaris surat masuk dan keluar pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kecamatan Tanah Putih. Mengkonsep, membuat dan menyerahkan kepada atasan langsung, untuk diperiksa dan di tanda tangani, kemudian dikirim sesuai alamat yang di tuju.

d. Mengoperasikan Komputer.

Melakukan aktivitas kerja yang memerlukan bantuan komputer untuk melakukan input, proses dan output data yang diperlukan terkait dengan bidang kerja yang dilaksanakan.

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

1. Mempelajari penugasan yang diberikan atasan langsung

2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas

3. Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

Uraian Tugas administrasi pengujian:

a. Membantu Kepala Seksi Menyusun Rencana Kegiatan dan Menyiapkan Bahan Kerja di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

- b. Menyelenggarakan Pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitas teknis kendaraan yang meliputi standarisasi konstruksi kendaraan bermotor
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana alat uji
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan:
 1. Mempelajari penugasan yang diberikan atasan langsung
 2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas
 3. Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

Uraian tugas dari Kepala Seksi Pengujian yaitu:

- a. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk program kegiatan yang berhubungan dengan seksi pengujian kendaraan bermotor
- b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan pemeriksaan perawatan alat uji kendaraan bermotor.

Tahapan:

1. Mengumpulkan data keadaan alat uji, kerusakan serta permasalahan lainnya
2. Melakukan koordinasi dengan teknisi alat uji untuk menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam perawatan alat uji kendaraan.
3. Mengusulkan anggaran biaya untuk perawatan alat uji.
- c. Menyusun standar kebijakan teknis terhadap penggunaan jalan yang dilalui oleh kendaraan berat, berdimensi besar serta kendaraan yang bermuatan lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- d. Menginventarisir dan menyusun bahan untuk kebutuhan administrasi dan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor
 - f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Setelah dilakukan proses perawatan alat uji, selanjutnya dilakukan proses kalibrasi alat uji
 2. kalibrasi alat bertujuan untuk menenentukan keakurasian hasil uji dalam proses pengujian kendaraan bermotor
 3. Mengusulkan anggaran kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
 - g. Menyusun dan mengelola penyajian data kendaraan yang melakukan uji berkala yang beroperasi di wiliayah kabupaten Rokan Hlir. Dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Menghimpun data kendaraan yang melakukan uji berkala dalam satu bulan
 2. Dari data yang ada ditentukan jenis kendaraan, bahan bakar yang digunakan, dan lain sebagainya
 3. Membuat penyajian data kendaraan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami
 - h. menginventarisasi permasalahan, melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintakan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Uraian tugas dari Pengelola pengujian kendaraan bermotor yaitu:
- a. Memeriksa kendaraan yang akan dilakukan pengujian
Melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan dilakukan pengujian dengan langkah sebagai berikut:
 1. Mengamati kendaraan secara visual apakah dalam keadaan bersih dan juga dalam keadaan kosong.
 2. Memeriksa kendaraan dengan menggunakan alat uji diantaranya untuk memeriksa kedalaman alur ban, kelengkapan kendaraan seperti racun api

dan kotak obat, memeriksa kemiringan ban, memeriksa kekuatan pancar lampu, memeriksa rem, memeriksa kecepatan kendaraan

- b. Mengoperasikan alat uji
- c. Memberitahukan secara tertulis hasil uji dan kendaraan yang tidak lolos uji
Setiap kendaraan yang tidak memenuhi syarat kelulusan uji, maka dinyatakan tidak lulus uji dan disampaikan secara tertulis, hal-hal atau kendala-kendala yang menjadi penyebab kendaraan tersebut tidak lulus uji, dengan tujuan agar dilakukan perbaikan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali terhadap kendaraan tersebut
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban bidang tugas
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;
 1. Mempelajari penugasan yang diberikan atasan langsung
 2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas
 3. Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas

Kecamatan Kelayang memiliki 17 Desa yaitu :

1. Pulau Sengkilo
2. Kota Medan
3. Polak Pisang
4. Simpang Kota Medan
5. Tanjung Beludu
6. Pelangko
7. Simpang Kelayang
8. Teluk Sejuah
9. Dusun Tua
10. Bongkal Malang
11. Sungai Banyak Ikan
12. Sungai Pasir Putih

13. Sungai Golang
14. Sungai Kuning Benio
15. Pasir Beringin
16. Bukit Selanjut
17. Dusun Tua Pelang

2. Topografi

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Kelayang adalah berupa dataran sementara ketinggian dari permukaan laut di daerah Kelayang adalah sekitar 52 laut meter. Desa Dusun Tua tertinggi merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai tinggi 52 laut meter. Sebaliknya Desa Pulau Sengkilo, Kota Medan, Polak Pisang dan Lainnya terendah merupakan desa dengan wilayah yang paling dekat dengan permukaan laut, dengan ketinggian rendah 13 laut meter dari permukaan laut.

Seluruh desa di wilayah Kecamatan Kelayang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan jarak 85 km jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten yaitu desa Sungai Kuning Binio.

3. Keadaan Monografi Kecamatan Kelayang

a. Kependudukan

Berdasarkan data yang tertulis dalam data jumlah penduduk di kecamatan kelayang berjumlah 26.995 jiwa. Berikut ini akan di sajikan data penyebaran penduduk kecamatan kelayang.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kelayang Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	13.675
2.	Perempuan	13.320
	Jumlah	26.995

Sumber : Kantor Camat Kelayang

b. Mata penceharian

Adapun untuk mata penceharian atau jenis untuk pekerjaan yang ada di kecamatan kelayang terdiri dari petani (70%) sebagian petani



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden dengan analisa yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala UPT Pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dan Kasubag TU UPT Pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian penulis juga menyebarkan kusioner kepada 8 orang pegawai Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan hilir dan 30 orang masyarakat yang melakukan pengurusan KIR .

Dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisa sebagai bahan informasi maka perlu mencari data yang akurat dari responden. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui penyebaran kusioner dan wawancara sehingga diperoleh identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan responden.

1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada bagian ini akan di uraikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat diketahui secara persentase jumlah responden yang ada di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat identitas responden dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki- laki	5	62
2.	Perempuan	3	38
Jumlah		8	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan table diatas dapat diketahui responden menurut jenis kelamin dalam penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung tanjung di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Masyarakat yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki- laki	23	76,7
2.	Perempuan	7	23,3
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang. Dari segi jenis kelamin, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki sebanyak 23 orang atau 76,7%, dan perempuan sebanyak 7 orang atau 23,3%.

2. Identitas Berdasarkan Usia

Pada bagian ini responden akan dideskripsikan dari segi usia, jadi usia seseorang merupakan tingkat kematangan seseorang dalam pengambilan keputusan. Pekerja yang lebih tua atau lebih matang diketahui lebih bijak dalam mengambil keputusan atau tindakan dibandingkan dengan pekerja yang lebih muda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tua seseorang maka semakin lemah fisiknya dalam bekerja dibandingkan dengan karyawan lainnya dengan orang yang lebih muda. Untuk itu perlu

diketahui umur pegawai dan data masyarakat untuk uji kendaraan bermotor UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Usia Pegawai Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	20 – 30 Tahun	2	20
2	31 – 40 Tahun	3	30
3	41 – 50 Tahun	4	40
4	50 > Tahun	1	10
Jumlah		10	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022 Berdasarkan tabel di atas diketahui juga bahwa menurut identitas responden jika dilihat dari tingkat umur, untuk umur 20-30 tahun ada 2 orang dengan persentase 20%, tetapi pada usia 31-40 tahun ada 3 orang dengan persentase 30%, kemudian pada 4 orang umur 41-50 dengan persentase 40% dan umur 50 ke atas 1 orang dengan persentase 10%. Dapat disimpulkan bahwa responden pegawai menurut tingkat umur juga mempengaruhi kinerja seorang pegawai, oleh Karena itu dalam usia 31-40 tahun tersebut masih produktif, masih aktif dan semangat dalam menjalankan tugasnya, maka diharapkan pegawai Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan hendaknya dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang penuh agar dapat mencapai tujuan.

Tabel V.4 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Usia Masyarakat Yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	20 – 30 Tahun	7	23,3
2	31 – 40 Tahun	13	43,4
3	41 – 50 Tahun	6	20
4	50 > Tahun	4	13,3
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk identitas responden jika di pandang dari tingkat umur maka yang dominan adalah umur 31-40 tahun yaitu berjumlah 13 orang dengan persentase 43,3%, selanjutnya umur terbanyak kedua adalah 20-30 tahun dengan jumlah 7 orang dengan persentase 23,3%, selanjutnya di susul oleh umur 41-50 tahun dengan jumlah 6 orang dengan persentase 20%, dan yang terakhir umur 50> tahun dengan jumlah 4 orang dengan jumlah persennya 13,3%.

3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dan terpenting guna dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dengan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian ini terdiri dari lima tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, SLTA, S1 dan S2. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Usia Pegawai Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SLTA	8	80
4	S1	1	10
5	S2	1	10
Jumlah		10	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan tingkat pendidikannya terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat SD sampai dengan S2, sementara itu jenjang pendidikan di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir seperti yang tercantum dalam tabel diatas responden berpendidikan SLTA

sebanyak 8 orang dengan persentase 80%, S1 sebanyak 1 orang dengan persentase 10% dan, S2 sebanyak 1 orang dengan persentase 10%.

Dari tabel tersebut dapat penulis lihat bahwa pegawai Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tingkat pendidikannya terbilang memadai untuk kategori terpelajar atau terdidik. Maka di harapkan pegawai Kantor UPT Pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dapat menjalankan tugas dan fungsinya guna memaksimalkan pencapaian tujuan, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tabel V.6 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Usia Masyarakat Yang Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang

No	Usia	Jumlah	Persentase %
	SD	5	16,7
	SLTP	12	40
	SLTA	12	40
	S1	1	3,3
	Jumlah	30	100

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari beberapa bagian, bahwa jenjang pendidikan bagi masyarakat di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan pada tabel diatas responden berpendidikan SD 5 orang dengan persentase 16,7%, kemudian dilanjutkan dengan SLTP 12 orang dengan persentase 40%, SLTA yaitu 12 orang dengan persentase 40%, selanjutnya S1 sebanyak 1 orang dengan persentase 3,3%.

Dari seluruh responden yang ada diharapkan bagi setiap pengendara khususnya kendaraan angkutan barang yang tidak atau belum melakukan uji berkala kendaraanya sebaiknya melakukan uji berkala kendaraan mereka agar tidak merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

Instrumen penelitian berupa wawancara dan kuesioner penelitian disusun sesuai dengan operasional variabel penelitian terkait Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir. Indikator dalam penelitian ini terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Berdasarkan olahan data penelitian pada indikator Komunikasi diketahui hasil dari sebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melak	6 (75%)	2 (25%)	0	8 (100%)

1	2	3	4	5	6
	ukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP.				
2	Memberikan informasi kepada masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan.	7 (87,5%)	1 (12,5%)	0	8 (100%)
3	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai	5 (62,5%)	3 (37,5%)	0	8 (100%)

	aturan pengujian kendaraan.				
Jumlah	18	6	0	24	
Rata-rata	6	2	0	8	
Persentase	75%	25 %	0%	100 %	

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022.

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, tanggapan 8 responden karyawan terhadap item penilaian dalam indikator komunikasi, total nilai setiap kategori penilaian meliputi: Terlaksana, nilai persentase 75%, Cukup Terlaksana, nilai persentase 25%, dan Kurang Terlaksana, nilai persentase adalah 0%.

Dari data dan penjelasan bisa disimpulkan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Komunikasi, sudah Terlaksana , nilai persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden pegawai. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Komunikasi, diketahui hasil dari sebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian

Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP.	5 (16%)	10 (34%)	15 (50%)	30 (100%)
1	2	3	4	5	6
2	Memberikan informasi kepada masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor	6 (23%)	13 (47%)	11 (30%)	30 (100%)

	tor mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan.				
3	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan pengujian kendaraan.	7 (24%)	14 (46%)	9 (30%)	30 (100%)
	Jumlah	18	37	35	90
	Rata-rata	6	12,3	11,7	30
	Persentase	20%	41,1%	38,9%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas bisa disimpulkan jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Komunikasi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan nilai persentase 20%, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 38%, dan Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 41,1%.

Dari data dan penjelasan diatas bisa disimpulkan jawaban masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Komunikasi, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 41,1%, ini dibuktikan dengan hasil

kuisisioner pada responden masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Rakhmad, S.Sos M.Si selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, mengenai indikator Komunikasi beliau menjelaskan bahwa:

“Pengarahan terhadap petugas selalu dilakukan setiap hari senin pada saat melakukan apel pagi, dalam kegiatan apel pagi ini kepala upt selalu memberikan pemahaman, pengarahan ataupun instruksi kepada petugas untuk mengingatkan masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.”(Wawancara : Senin 7 Maret 2022).

Dari hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa setiap senin pagi selalu dilakukan pengarahan pada saat apel pagi tentang informasi atau pun aturan tentang pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Ermansyah selaku Kasubag TU UPT Pengujian Kanedaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilirbeliau menjelaskan bahwa:

“Masyarakat belum semuanya memahami tujuan dari pengujian kendaraan bermotor, dalam hal penyampaian kepada masyarakat tentang sanksi bagi yang melanggar aturan pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan cara pendektan secara khusus agar masyarakat mudah untuk menerima informasi yang diberikan, juga sebagian besar masyarakat belum memahami aturan pengujian kendaraan bermotor hal ini dapat dilihat karena masih banyak kendaraan yang tidak lulus uji.” (Wawancara : Senin, 7 Maret 2022).

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, peneliti melihat dalam hal ini petugas telah menyampaikan informasi tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami aturan-aturan yang berlaku dalam hal pengujian kendaraan bermotor sehingga membuat masyarakat akan sulit untuk mendapatkan hasil lulus uji kelaiakan kendaraannya karena tidak

memenuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga harus melakukan uji ulang, tetapi juga ada masyarakat yang memahami aturan yang berlaku sehingga dapat memudahkan dalam proses pengujian kendaraan bermotor tersebut.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai dan masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala dan kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, dan hasil observasi penelitian dilapangan, maka bisa disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori Cukup Terlaksana.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pegawai yang berjumlah 8 orang responden terhadap penelitian Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Sumber Daya, diketahui hasil dari sebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah

Menyediakan pengujian yang berkualitas sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor	8 (100%)	0	0	8 (100%)
Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	7 (87,5%)	1 (12,5%)	0	8 (100%)
Menyediakan anggaran yang memadai untuk pengadaan/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor	8 (100%)	0	0	8 (100%)
Jumlah	23	1	0	24
Rata-rata	7,7	0,3	0	8
Persentase	96,25%	3,75%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator Komunikasi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan nilai persentase 96,25%, Cukup terlaksana dengan nilai persentase 3,75%, dan Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 0%.

Dari data dan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Sumber Daya, Terlaksana dengan nilai persentase 96,25%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden pegawai. Sesuai

dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap penelitian Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Sumber Daya, diketahui hasil dari sebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
	2	3	4	5	6
	Menyediakan penguji yang berkualitas sebagai pelaksana pengujian kendaraan bermotor	10 (33,4%)	12 (40%)	8 (26,6%)	30 (100%)
	Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	12 (40%)	14 (47%)	4 (13%)	30 (100%)
	2	3	4	5	6
	Menyediakan anggaran yang memadai untuk pengadaan/peliharaan alat	9 (30%)	11 (36,7%)	10 (33,3%)	30 (100%)

	pengujian kendaraan bermotor				
	Jumlah	31	37	22	90
	Rata-rata	10,3	12,3	7,4	30
	Persentase	34,3%	41%	24,7%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Sumber Daya, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan nilai persentase 34,3%, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 41%, dan Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 24,7%.

Dari data dan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Sumber Daya, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 41%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Rakhmaad, S.Sos M.Si, mengenai indikator Sumber Daya beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam hal ini petugas yang ada sudah melalu pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengujian kendaraan bermotor, juga fasilitas yang ada cukup terpenuhi dan penganggaran dana untuk pengadaan dan pemeliharaan alat juga cukup terlaksana melalui koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Rokan hilir untuk penganggaran dana. (Wawancara : Senin, 7 Maret 2022).

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, penelit melihat bahwa petugas penguji telah memiliki pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan dan juga fasilitas yang ada secara umum masih belum dikatakan

nyaman seperti belum tersedia kipas angin, di dalam loket pendaftaran pengurusan kir sehingga pengguna layanan tidak nyaman dalam melakukan proses pelayanan pada saat menjelang siang hari, kenyamanan tempat dalam proses pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan, selain itu tempat pelayanan juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Ermansyah selaku Kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir, mengenai indikator Sumber Daya beliau menjelaskan bahwa :

“Tanggapan masyarakat tentang petugas penguji yang berkualitas yaitu ada yang menerima dan ada yang tidak, yang menerima itu masyarakat cukup senang karna pelaksanaannya jadi terjamin dan hasil yang memuaskan yang tidak menerima yaitu karena kendaraannya tidak di luluskan dalam uji kendaraannya. Mengenai fasilitas yang ada masyarakat cukup puas dan masyarakat juga cukup mengetahui tentang penganggaran dana untuk pengadaan dan pemeliharaan alat uji di UPT pengujian Kendaraan Bermotor Dinas perhubungan kabupaten Rokan Hilir.”
(Wawancara : Senin, 7 Maret 2022)

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, seharusnya pegawai lebih tahu bahwa sarana dan prasarana apa saja yang belum tersedia akan segera di sediakan agar masyarakat merasakan kenyamanan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai dan masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala dan kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, dan hasil observasi penelitian dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori Cukup Terlaksana.

3. Disposisi

Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pegawai yang berjumlah 8 orang responden terhadap penelitian Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Sumber Daya, diketahui hasil dari sebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator Disposisi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Rokan Hilir

	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan pengujian kendaraan bermotor	8 (100%)	0	0	8 (100%)
2	Respons dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan	8 (100%)	0	0	8 (100%)

	an penguji an kendar aan bermot or.				
	Jumlah	16	0	0	16
	Rata-rata	8	0	0	8
	Persentase	100%	0%	0%	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator Disposisi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan nilai persentase 100%, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 0%, dan Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 0%.

Dari data dan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Disposisi, Terlaksana dengan nilai persentase 100%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden pegawai. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap penelitian Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Disposisi, diketahui hasil dari sebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Disposisi terhadap Pelaksanaan pengujian kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

N	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan pengujian kendaraan bermotor	10 (33%)	16 (54%)	4 (13%)	30 (100%)
2	Respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor.	8 (27%)	12 (40%)	10 (33%)	30 (100%)
Jumlah		18	28	14	60
Rata-rata		9	14	7	30
Persentase		30%	47%	23%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Disposisi, jumlah

nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan nilai persentase 30%, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 47%, dan Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 23%.

Dari data dan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Disposisi, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 47%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Rakhmad, S.Sos M.Si selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir, mengenai indikator Disposisi beliau menjelaskan bahwa :

“Petugas sudah memahami tentang kebijakan pengujian kendaraan bermotor terlihat dari pelaksanaan dilapangan dan juga petugas mampu mengimplementasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dengan baik, karena jika petugas tidak dapat memahami kebijakan tersebut maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat berjalan dengan baik maka dari setiap petugas harus memahami atau mengetahui kebijakan yang ada.” (Wawancara : Senin, 7 Maret 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap petugas pelaksana pengujian harus memahami dan mampu mengimplemetasikan kebijakan dengan baik agar mencapai tujuan yang direncanakan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Ermansyah selaku Kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir, mengenai indikator Disposisi beliau menjelaskan bahwa :

“Petugas sudah melakukan pengujian sesuai dengan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dan juga dapat mengimplementasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dengan baik.” (Wawancara : Senin, 7 Maret 2022).

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa petugas yang melakukan pengujian kendaraan bermotor mampu mengimplementasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dengan cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai dan masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala dan kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, dan hasil observasi penelitian dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir berada pada kategori Cukup Terlaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden pegawai yang berjumlah 12 orang responden terhadap penelitian Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Sumber Daya, diketahui hasil dari sebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

N	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6

1	Melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP.	8 (100%)	0	0	8 (100%)
2	Memiliki alat pengujian Kendaraan Bermotor sesuai SOP.	8 (100%)	0	0	8 (100%)
3	Kompetensi Pegawai pelaksana pengujian yang sesuai SOP.	8 (100%)	0	0	8 (100%)
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	24	0	0	24
	Rata-rata	8	0	0	8
	Persentase	100%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban dari 18 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator Struktur Birokrasi,

jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah nilai persentase 100%, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 0%, dan Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 0%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Struktur Birokrasi, Terlaksana dengan nilai persentase 100%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden pegawai. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap penelitian Analisis Pelayanan Publik di Kantor Camat Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan) dalam indikator Produk Pelayanan, yang terdiri dari dua item yang dinilai yaitu Ketepatan data pelayanan dan Hasil produk pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

N	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1	2	3	4	6	7
1	Melakukan pengujian kendaraan bermotor	10 (33,3%)	12 (40%)	8 (26,7%)	30 (100%)

1	sesuai SOP	2	3	4	5	6
2	Memiliki alat pengujian Kendaraan Bermotor sesuai SOP	10 (33,3%)	15 (50%)	5 (16,7%)	30 (100%)	
3	Kompetensi Pegawai pelaksana pengujian yang sesuai SOP	13 (43,3%)	13 (43,3%)	4 (13,4%)	30 (100%)	
Jumlah		33	40	17	60	
Rata-rata		11	13,3	5,7	30	
Persentase		36,7%	44,3%	19%	100%	

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator Struktur Birokrasi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan nilai persentase 36,7%, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 44,3%, dan Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 19%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor jenis Angkutan barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di kabupaten Rokan Hilir dalam indikator Struktur Birokrasi, Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 43%, ini dibuktikan dengan hasil

kuisisioner pada responden masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Rakhmaad, S.Sos M.Si selaku Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir, mengenai indikator Struktur Birokrasi beliau menjelaskan bahwa :

“Para petugas sudah melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP, dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir telah lulus praakreditasi oleh Kementerian Perhubungan, dan dalam hal ini juga kompetensi pegawai merupakan salah satu syarat akreditasi oleh kementerian perhubungan.” (Wawancara : Senin, 7 Maret 2022)

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan Bahwa setiap petugas telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan baik dan juga UPT pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir telah lulus praakreditasi oleh Kementerian Perhubungan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H.Ermansyah selaku Kasubag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hilir, mengenai indikator Struktur Birokrasi beliau menjelaskan bahwa :

“Tanggapan masyarakat dengan SOP dari petugas pengujian kendaraan bermotor cukup puas namun masyarakat berharap adanya modernisasi terhadap alat pengujian kendaraan bermotor.” (Wawancara : Senin, 7 Maret 2022)

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, Peneliti menemukan bahwa masyarakat berharap adanya modernisasi pada alat pengujian kendaraan bermotor yang ada karena di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan sistem pengujian konvensional, saat ini sistem pengujian di beberapa tempat sudah

menggunakan sistem SIM-PKB yaitu berbasis sistem informasi manajemen, sehingga memiliki fungsi yang lengkap pada saat diimplementasikan. Tujuan utama dari pengembangan SIM-PKB ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan akurat di sisi pelayanan publik. Pada Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB) terkomputerisasi dan tidak memerlukan tenaga kerja manual.

Selanjutnya agar dapat mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pegawai mengenai penelitian Analisis Pelayanan Publik di Kantor Camat Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

N	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	6 (75%)	2 (25%)	0	8
2	Sumber Daya	7,7 (96,25%)	0,3 (3,75%)	0	8
3	Disposisi	8 (100%)	0	0	8
4	Struktur Birokrasi	8 (100%)	0	0	8
Jumlah		29,7	2,3	0	32
Rata-rata		7,5	0,5	0	8
Persentase		93,75%	6,25%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi tanggapan responden Pegawai terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir, untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 93,75%, untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 6,25%, dan untuk kategori penilaian Kurang Terlaksana adalah sebesar 0%, dari total keseluruhan responden Pegawai Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 8 orang.

Dari hasil tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa jawaban responden Pegawai terhadap penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan Terlaksana dengan total persentase sebesar 93,75%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Terlaksana.

Selanjutnya agar dapat mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat mengenai penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

N	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	6 (20%)	12,3 (41,1%)	11,7 (38,9%)	30
2	Sumber Daya	10,3 (34,3%)	12,3 (41,1%)	7,4 (24,7%)	30
3	Disposisi	9 (30%)	14 (47%)	7 (23%)	30
4	Struktur Birokrasi	11 (36,7%)	13,3 (44,3)	5,7 (19%)	30
Jumlah		36,3	51,9	31,8	120

Rata-rata	7,8	13,2	9	30
Persentase	26%	44%	30%	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir diatas, untuk kategori penilaian Terlaksana dengan nilai persentase 26%, untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana dengan nilai persentase 44%, dan untuk kategori penilaian Kurang Terlaksana dengan nilai persentase 30%, dari total keseluruhan responden masyarakat sebanyak 30 orang.

Dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa jawaban responden Masyarakat terhadap penelitian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 44%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berlandaskan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator **Komunikasi**, Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, diketahui bahwa setiap senin pagi selalu dilakukan pengarahannya pada saat apel pagi tentang informasi atau pun aturan tentang pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami aturan-aturan yang berlaku dalam hal pengujian kendaraan bermotor sehingga membuat masyarakat akan sulit untuk mendapatkan hasil lulus uji kelayakan kendaraannya karena tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga harus melakukan uji ulang, tetapi juga ada masyarakat yang memahami aturan yang berlaku sehingga dapat memudahkan dalam proses pengujian kendaraan bermotor tersebut.

Selanjutnya berlandaskan hasil observasi yang peneliti laksanakan tentang indikator **Sumber Daya**, peneliti melihat bahwa petugas penguji telah memiliki pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan dan juga fasilitas yang ada secara umum masih belum dikatakan nyaman seperti belum tersedia kipas angin, di dalam loket pendaftaran pengurusan kir sehingga pengguna layanan tidak nyaman dalam melakukan proses pelayanan pada saat menjelang siang hari, kenyamanan tempat dalam proses pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan, selain itu tempat pelayanan juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, seharusnya pegawai lebih tahu bahwa sarana dan prasarana apa saja yang belum tersedia akan segera di sediakan agar masyarakat merasakan kenyamanan.

Selanjutnya berlandaskan hasil observasi yang peneliti laksanakan tentang indikator **Disposisi**, menunjukkan bahwa petugas yang melakukan pengujian kendaraan bermotor mampu mengimplementasikan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dengan cukup baik.

Selanjutnya berlandaskan hasil observasi yang peneliti laksanakan tentang indikator **Struktur Birokrasi**, Peneliti menemukan bahwa masyarakat berharap adanya modernisasi pada alat pengujian kendaraan bermotor yang ada karena di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan sistem pengujian konvensional, saat ini sistem pengujian di beberapa tempat sudah menggunakan sistem SIM-PKB yaitu suatu sistem yang berbasiskan pada sebuah Sistem Informasi Manajemen sehingga mempunyai fungsi-fungsi yang lengkap dalam implementasinya. Tujuan utama dari dikembangkannya SIM-PKB ini adalah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan dan akurat di sisi layanan publik Pada Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB) dilakukan secara komputerisasi tanpa lagi secara manual.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir

Hambatan merupakan suatu rintangan ataupun tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab, hambatan biasanya juga bisa dikenal dengan masalah yang dihadapi. Hambatan bisa menjadi penyebab yang akan mempengaruhi suatu pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam hal ini adapun yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Pada UPTD pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung Di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukan bahwa banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji berkala serta kurangnya kesadaran pengguna jasa untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dan pengurangan polusi udara, sehingga membuat masyarakat akan sulit untuk mendapatkan hasil lulus uji kelayakan kendaraannya karena tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan.
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat masih sangat kurang, banyak yang tidak disiplin dalam mengujikan kendaraannya seperti pelaksanaan waktu uji, juga ada masyarakat yang mengujikan kendaraannya tetapi onderdil kendaraan merupakan hasil pinjaman dari kendaraan lain.
3. UPT Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir masih menggunakan sistem pengujian konvensional, saat ini sistem pengujian di beberapa tempat sudah menggunakan sistem SIM-PKB yaitu berbasis sistem informasi manajemen, sehingga memiliki fungsi yang lengkap pada saat diimplementasikan. Tujuan utama dari pengembangan SIM-PKB ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan akurat di sisi pelayanan publik. Pada Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB) terkomputerisasi dan tidak memerlukan tenaga kerja manual.

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden dengan analisa yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian penulis juga menyebarkan kusioner kepada 15 orang pegawai Kantor Camat Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dan 30 orang masyarakat yang berkunjung ke kantor Camat Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisa sebagai bahan informasi maka perlu mencari data yang akurat dari responden. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui penyebaran kusioner dan wawancara sehingga diperoleh identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan responden.

1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada bagian ini akan di uraikan identitas responden dari sisi jenis kelamin, sehingga dapat diketahui secara persentase jumlah responden yang ada di Kantor Camat Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat identitas responden dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Kantor Camat Kelayang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan)

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	13	65%
2	Perempuan	7	35%
Jumlah	20	100%	

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang pada UPTD pengujian kendaraan bermotor ujung tanjung di Kabupaten Rokan hilir, dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi, pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan pengujian kendaraan bermotor belum terlaksana dengan baik karena masih adanya masyarakat yang tidak memahami tentang aturan pengujian dan sanksi yang berlaku.
2. Sumber Daya, alat uji kendaraan bermotor yang ada sudah lengkap namun perlu adanya pembaharuan untuk menggunakan sistem yang terkomputerisasi seperti SIM-PKB.
3. Disposisi, pegawai yang melakukan pelaksanaan pengujian kendaraan sudah baik sesuai yang dijanjikan, mampu menggunakan alat uji dengan baik dan juga sudah melakukan pelatihan kompetensi untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
4. Struktur Birokrasi, dalam hal ini pegawai sudah melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP yang ada dan juga alat uji kendaraan yang ada sudah lengkap namun perlu adanya pembaharuan pada alat uji kendaraan bermotor yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, sebagai berikut:

1. Diharapkan UPT Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir beralih menggunakan sistem pengujian kendaraan bermotor ke yang lebih modern seperti menggunakan sistem SIM-PKB yaitu berbasis sistem informasi manajemen, sehingga memiliki fungsi yang lengkap pada saat diimplementasikan. Tujuan utama dari pengembangan SIM-PKB ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan akurat di sisi pelayanan publik. Pada Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM-PKB) terkomputerisasi dan tidak memerlukan tenaga kerja manual.
2. Masyarakat seharusnya lebih peduli dengan kondisi kendaraan bermotor milik mereka, karena kendaraan yang mereka gunakan untuk mencari rezeki juga tidak boleh melupakan aspek- aspek keselamatan yang mana juga di uji dalam uji berkala kendaraan bermotor.
3. Diharapkan kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tetap memberikan pengarahan dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan bermotor agar tidak mencelakai diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, Hendry, dan A. Tarmizi Yusa. 2015. *Perilaku dan Etika Admnistrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Dimock, Marshal edward dan Gladys Ogden Dimock, 1984. *Administrasi negara*, Jakarta, Aksara Baru
- Anggowo, 2008. *Actuating Dalam Pendidikan*, Rosda Karya Press, Bandung
- Chang, William. 2014. *Metodologi Penulisan Ilmiah*. Jakarta, Erlangga.
- Danang, Sunyoto. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Buku Seru.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Handoko T. Hani. 2009. *Management*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Kencana Syafie, Inu, 2015. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kencana Syafie, Inu , 2016. *Sistem Adiministrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, Bumi Aksara
- Pasolong Harbani.2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Robin Stephen. 1994. *Teori Organisasi*, Jakarta, Arcan.
- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Ilmu Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Siagian, P, Sonadnag. 2006. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Mandar Maju
- Sudjana Nana, 2004. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Falah Prodition, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung Mandar Maju.
- Terry Georgi R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Askara, Jakarta
- Torang, Syamsir, 2013. *Organisasi dan manajemen*. Bandung:Alfabeta

- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisa Kebijakan dan Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Zulkifli, dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang: **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang: **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2021 tentang: **Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Ali, Faried, dan Baharuddin. 2014. Ilmu administrasi dalam hakikat inti. Bandung, Rafika Aditama.

Atik, dan Ratminto 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Chang, Wiliam, 2014. *Metodologi Penulisan Ilmiah*. Jakarta, Erlangga.

Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta, Rajawali Pers.

Indihono, Dwiyanto. 2009 *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava Media.

Kencana Syafie, Inu, 2015. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Kencana Syafie, Inu, 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, Bumi Askara.

Kartono, Kartini, 2016. *Pimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta, Rajawali Pers.

Muhammad, Arni, 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta, Bumi Askara.

Napitupulu, Paiman, 2014. *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Bandung, PT Alumni.

Pasolong, Herbani. 2008 *Teori Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

- Poltak, Lijan. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik*. Alfabeta, Makasar.
- Serdamayanti, 2010. *Reformasi Administrasi publik, reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung, Rafika Aditama,
- Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manaejemen*. Bandung, Mandar Maju.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau